



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : KEPANITERAAN
SUB UNIT KERJA : KEPANITERAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WILMA SILALAH**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI TK. II**
3. NHK : **142535**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.202.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m²/144 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m²/60 m² di KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Bangunan Seluas 35 m² di KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m²/144 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/150 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, VESPA LX 150 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 992.795.848**D. SURAT BERHARGA** Rp. 17.420.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.823.903.802**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 26.449.199.650**III. HUTANG** Rp. 2.798.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 23.651.199.650

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 November 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.